

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP IMPLIKASI YURIDIS PERKAWINAN SIRI: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Jazmine Sukma Sulaeman

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Correspondensi author

M. Abdul Rahman

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Asep Nurmansyah

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Agus Septima Ridwan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

*Unregistered marriage (siri marriage) is a form of marriage that is valid under religious law but is not recorded with the authorized marriage registrar, thus receiving no legal recognition from the state. This study aims to analyze the juridical implications of siri marriages on the legal status of wives, children, and marital property, as well as to evaluate the effectiveness of Indonesia's positive law instruments in providing legal protection and rights recovery for the aggrieved parties. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are drawn from Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. The findings reveal that siri marriages create significant legal vacuums for wives and children, including the loss of rights to maintenance, joint marital property, and inheritance. Existing legal protection is reactive rather than preventive, relying on the *itsbat nikah* mechanism at the Religious Court, which is not easily accessible for underprivileged communities. The state must strengthen the marriage registration system as a comprehensive legal protection instrument.*

Keywords: Siri Marriage, Legal Protection, Women and Children, Marriage Registration, *Itsbat Nikah*

Abstrak

Perkawinan siri merupakan praktik perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak diakui oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perkawinan siri terhadap status hukum istri, anak, dan harta perkawinan, serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri menimbulkan kekosongan hukum yang nyata bagi istri dan anak, mencakup hilangnya hak nafkah, harta bersama, dan hak waris anak. Perlindungan hukum yang tersedia bersifat reaktif, bukan preventif, karena bergantung pada mekanisme *itsbat nikah* di Pengadilan Agama yang prosesnya tidak mudah dijangkau masyarakat prasejahtera. Negara perlu